PATROLI KETERTIBAN UMUM DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

Gilang Dwi Hartanto
NPP. 33.0196
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: gilangdwihartanto@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP.,M.Si
Email: irfanuluputty@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement : *The author focuses on the increasing presence of homeless people and beggars affecting public order in Jambi City. Previous studies largely focus on macro-social policies , leaving a gap in research examining the direct implementation of public order patrols by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as a street-level policy.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and describe the implementation of public order patrols carried out by Satpol PP of Jambi City in handling homeless people and beggars to maintain public tranquility.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative research method using the symbolic interaction approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation , involving informants such as the Head of Satpol PP, the Head of Public Order and Community Tranquility Division, patrol officers, and members of the community.* ***Result:*** *This study found that the implementation of public order patrols by Satpol PP of Jambi City was carried out through five dimensions of symbolic interaction. The patrols were conducted using a humanistic and persuasive approach through polite and educative communication toward both the community and homeless people and beggars. Furthermore, the implementation of patrols increased public understanding of the importance of public order and encouraged social support for Satpol PP activities. In addition, the patrols contributed to behavioral changes among homeless people and beggars as well as improvements in public order conditions in several vulnerable areas in Jambi City.* ***Conclusion:*** *This study concludes that public order patrols function not only as enforcement activities but also as a form of public service and social guidance in maintaining community tranquility.*
Keywords: *Homeless people and beggars; Public order patrol; Symbolic interaction.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan gelandangan dan pengemis yang berdampak terhadap ketertiban umum dan tata kelola ruang publik di Kota Jambi. Terdapat kesenjangan penelitian di mana studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan sosial makro , dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana patroli

ketertiban umum berperan sebagai implementasi kebijakan di tingkat jalanan (*street-level*) oleh Satpol PP. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan patroli ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Jambi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan interaksi simbolik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum, petugas patroli, dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan patroli ketertiban umum oleh Satpol PP berjalan melalui lima dimensi interaksi simbolik. Patroli dilaksanakan dengan pendekatan humanis dan persuasif melalui komunikasi yang sopan dan edukatif. Pelaksanaan patroli juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketertiban umum serta mendorong dukungan sosial, dan turut memberikan dampak terhadap perubahan perilaku gelandangan dan pengemis serta peningkatan kondisi ketertiban di lokasi rawan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa patroli ketertiban umum tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penertiban, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik dan pembinaan sosial dalam menjaga ketenteraman masyarakat.
Kata kunci: Gelandangan dan pengemis; Interaksi simbolik; Patroli ketertiban umum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan isu sosial kompleks yang tidak hanya dipicu oleh masalah kemiskinan struktural, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan dinamika ruang, ketertiban umum, dan tata kelola perkotaan. Permasalahan ini bukan sekadar fenomena di negara berkembang, melainkan juga terjadi di negara maju. Berdasarkan data *World Population Review* (2026), negara maju sekalipun masih menghadapi angka tunawisma yang tinggi, seperti Amerika Serikat (653.104 jiwa), Prancis (333.000 jiwa), dan Inggris (109.658 jiwa). Keberadaan gepeng di ruang publik acap kali menciptakan kesan negatif terhadap estetika kota, mengganggu kenyamanan warga, serta berisiko menghambat lalu lintas (Lundberg et al., 2024).

Di tingkat nasional, fenomena gepeng juga terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan persebaran gepeng tertinggi berada di Jawa Barat (15.940 jiwa), DKI Jakarta (14.760 jiwa), dan Jawa Timur (13.650 jiwa). Hal ini mempertegas bahwa pusat pertumbuhan ekonomi menjadi daya tarik perpindahan penduduk yang bermuara pada peningkatan kerentanan sosial di ruang publik.

Dalam konteks Kota Jambi, permasalahan gepeng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung meningkat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jambi (2024), peningkatan signifikan terjadi di tiga kecamatan utama. Kecamatan Pasar Jambi sebagai pusat perdagangan mencatat jumlah gepeng tertinggi, meningkat dari 26 jiwa (2022) menjadi 43 jiwa (2024). Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Kota Baru (meningkat dari 24 menjadi 40 jiwa) dan Kecamatan Danau Sipin (dari 18 menjadi 29 jiwa).

Kota Jambi memiliki tantangan tersendiri karena belum memiliki fasilitas rehabilitasi sosial permanen (seperti panti/rumah singgah terpadu) yang memadai, sehingga penanganan gepeng di lapangan sangat bergantung pada peran pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Data operasional Satpol PP Kota Jambi mencatat intensifikasi kegiatan patroli penertiban gepeng yang terus meningkat, yakni dari 7 kegiatan pada Agustus menjadi 10 kegiatan pada Oktober 2025. Oleh karena itu, kegiatan patroli ketertiban umum oleh Satpol PP bukan sekadar aktivitas pengawasan rutin, melainkan instrumen utama pemerintah daerah (*early intervention unit*) dalam memitigasi potensi

gangguan ketertiban, menjembatani kelompok rentan dengan layanan sosial, dan memastikan keamanan publik secara humanis (Beck, 2025).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada implementasi langsung di tingkat jalanan (*street-level policy implementation*) melalui kegiatan patroli ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Jambi dalam menangani gelandangan dan pengemis. Sementara itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan sosial makro, determinan sosial-ekonomi (kemiskinan dan urbanisasi), serta efektivitas program perumahan atau kesejahteraan secara umum. Terdapat kesenjangan literatur yang signifikan mengenai mekanisme teknis lapangan, pola komunikasi, dan proses interaksi sosial aparat penegak ketertiban dengan masyarakat rentan (gepeng). Penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong tersebut.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan dan efektivitas patroli ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah akan kekurangan dasar evaluasi empiris yang komprehensif mengenai dinamika interaksi aparat di lapangan. Tanpa data ini, perumusan strategi kebijakan berisiko terus bersifat kaku, represif, dan hanya menjadi solusi penertiban sesaat tanpa memberikan dampak perbaikan perilaku sosial. Hasil penelitian ini krusial sebagai acuan bagi perancangan pendekatan penertiban yang lebih efektif, persuasif, humanis, dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dan memperluas wacana dari beberapa kajian terdahulu di bidang ketertiban sosial dan kebijakan publik, antara lain: (Beck, 2025) yang mengkaji kebijakan penegakan ketertiban di ruang publik (studi di AS dan Inggris) dengan temuan bahwa penegakan aturan berhasil jika disertai kebijakan sosial. (Stevens et al., 2025) yang meneliti faktor sosial-ekonomi, kemiskinan, dan urbanisasi sebagai penyebab utama munculnya pengemis di perkotaan. (Anthony et al., 2024) yang menilai efektivitas patroli keamanan dalam menjaga citra estetika kota, menemukan bahwa patroli mampu meningkatkan rasa aman warga jika dilakukan secara humanis. (Prenzler et al., 2025) yang mengkaji model patroli keamanan berbasis kolaborasi sosial (*community policing*) sebagai *early intervention unit*. (Bryson et al., 2024) yang membedah efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi gelandangan melalui penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memuat kebaruan ilmiah (*novelty*) dari aspek lokus empiris dan landasan teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya memandang penanganan gepeng murni dari kacamata kesejahteraan makro atau sekadar efektivitas penindakan hukum, penelitian ini membedah proses penanganan dari "aktor lapangan"-nya secara langsung, yakni Satpol PP. Secara spesifik, penelitian ini

menggunakan pisau analisis mikro sosiologis, yakni Teori Interaksi Simbolik dari George Herbert Mead (meliputi tindakan simbolik, interaksi sosial, interpretasi, pembentukan makna kolektif, dan perubahan perilaku). Pendekatan ini memberikan perspektif baru bahwa patroli ketertiban bukanlah sekadar tindakan represif fisik, melainkan sebuah proses komunikasi silang dan pembentukan makna sosial di ruang publik.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan patroli ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan gelandangan dan pengemis Kota Jambi sebagai salah satu fungsi utama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead/Blumer. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam di dalam konteks alaminya, khususnya untuk menggali dan menjelaskan proses interaksi sosial, komunikasi, serta pembentukan makna antara aparat Satpol PP, masyarakat, dan kelompok rentan selama pelaksanaan patroli. Pendekatan interaksi simbolik dinilai paling tepat karena fokus penelitian tidak sekadar melihat hasil akhir penertiban, melainkan membedah tindakan simbolik dan pertukaran makna yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui instrumen wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif secara langsung terhadap kegiatan patroli, dan dokumentasi pendukung (arsip, SOP, dan foto lapangan). Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki wewenang, kompetensi, serta keterlibatan langsung dengan pelaksanaan kebijakan penertiban

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Satpol PP Kota Jambi dan Kepala Bidang Ketertiban Umum sebagai informan kunci, karena keduanya merupakan pemegang kewenangan kebijakan dan pengambil keputusan utama terkait jalannya patroli. Selain itu, informan juga mencakup petugas patroli (seperti Kasi Ketertiban Umum dan Operasional) sebagai representasi pelaksana teknis di lapangan, serta tokoh masyarakat (seperti Pak Kasim dan Pak Rasyid) sebagai pihak yang merasakan langsung dampak patroli di lingkungan mereka. Kombinasi ini dipilih untuk memperoleh gambaran utuh dan objektif dari sisi pembuat kebijakan, pelaksana teknis, serta penerima dampak dari kebijakan.

Untuk menguji keabsahan (validitas) data kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan kesesuaian informasi yang diperoleh dari ragam informan yang berbeda, yakni antara pandangan pimpinan Satpol PP, petugas lapangan, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang konsistensi data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi interaksi di lapangan, dan dokumen resmi yang ada.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumen direduksi untuk memilah informasi yang spesifik dan relevan dengan topik interaksi simbolik

dalam patroli ketertiban. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis agar mudah dipahami, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang divalidasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Jambi, dengan fokus lokasi pada institusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi sebagai pelaksana utama, serta ditunjang oleh pemantauan di kawasan yang tinggi aktivitas masyarakatnya seperti Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Pasar Jambi, dan Kecamatan Danau Sipin. Rangkaian kegiatan pengumpulan data dan observasi lapangan ini disesuaikan dengan kalender akademik institut, yang secara intensif dilaksanakan pada rentang waktu Tahun Akademik 2025/2026 agar mampu memotret dinamika terkini operasional penertiban gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan patroli ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi dalam penanganan gelandangan dan pengemis menggunakan pisau analisis teori Interaksi Simbolik dari George Herbert Mead/Blumer. Penjabaran hasil temuan lapangan, tabel ringkasan, serta interpretasi analitis untuk setiap dimensi interaksi simbolik disajikan di bawah ini.

3.1. Tindakan Simbolik Satpol PP kepada Gelandangan dan Pengemis

Pelaksanaan patroli ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Jambi diawali dengan serangkaian tindakan fisik dan verbal yang berfungsi sebagai simbol sosial di ruang publik. Poin-poin mengenai bentuk tindakan simbolik serta respons yang ditimbulkan dari gelandangan dan pengemis dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1

Pola Tindakan Simbolik Personel Satpol PP dan Bentuk Respons Gelandangan/Pengemis

Aspek	Tindakan Simbolik Satpol PP Kota Jambi	Makna / Respons Gelandangan & Pengemis
1. Pola Komunikasi dan Bahasa	Menggunakan komunikasi persuasif, bahasa yang sopan, edukatif, serta menghindari tindakan kekerasan verbal sesuai SOP.	Kelompok rentan merasa dihargai martabat manusianya, sehingga menurunkan tingkat resistensi atau perlawanan defensif di ruang publik saat ditertibkan.
2. Sikap dan Gestur Tubuh	Menampilkan ekspresi yang tenang, tidak represif, serta menghindari gerakan tubuh yang mengintimidasi atau agresif saat turun dari mobil patroli.	Diinterpretasikan oleh gepeng sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan resmi pemerintah, bukan sebagai ancaman fisik yang membahayakan mereka.

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026

Tindakan simbolik yang ditunjukkan oleh personel Satpol PP Kota Jambi mencerminkan adanya pergeseran dari pola penertiban represif murni menuju pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Penggunaan bahasa yang sopan dan gestur tubuh yang tenang saat operasi penertiban

berlangsung tidak dimaknai sebagai ancaman oleh gelandangan dan pengemis, melainkan sebagai bentuk pembinaan normatif. Realitas lapangan ini membuktikan bahwa simbol-simbol otoritas—seperti seragam resmi dan mobil patroli—apabila dikombinasikan dengan komunikasi yang edukatif, efektif mereduksi ketegangan psikologis kelompok rentan serta mampu mencegah terjadinya konflik fisik di lapangan.

3.2. Proses Interaksi Sosial Aparat Satpol PP dalam Patroli

Interaksi sosial dalam kegiatan patroli tidak berlangsung satu arah, melainkan melibatkan hubungan timbal balik yang dinamis antara petugas, kelompok rentan, dan masyarakat luas selaku pengawas ruang publik. Dinamika proses interaksi sosial tersebut secara terperinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Dinamika Hubungan Interaksi Sosial Aparat Satpol PP, Kelompok Sasaran, dan Masyarakat

Elemen Interaksi	Strategi Interaksi Satpol PP	Dampak dan Hasil Lapangan
1. Hubungan Timbal Balik dengan Gepeng	Membina hubungan situasional yang kooperatif melalui pendekatan dari hati ke hati, mendengarkan alasan mereka turun ke jalan, dan memberikan arahan lisan.	Tercipta pola interaksi yang tidak konfrontatif. Kelompok gepeng cenderung patuh dan bersedia mengikuti arahan petugas tanpa memicu keributan di jalan raya.
2. Keterbukaan terhadap Keluhan Masyarakat	Bersikap responsif dan akomodatif dengan menyediakan kanal aduan, serta langsung menerjunkan personel untuk memantau titik-titik rawan yang dilaporkan warga.	Masyarakat merasa keluhannya didengar, memicu hubungan kemitraan yang baik antara warga Kota Jambi dan institusi Satpol PP.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Proses interaksi sosial yang dibangun oleh Satpol PP Kota Jambi di lapangan menunjukkan sifat yang situasional namun tetap kooperatif. Dengan membuka ruang komunikasi untuk mendengar keluhan gelandangan dan pengemis sekaligus bersikap responsif terhadap laporan masyarakat, Satpol PP berhasil memosisikan diri sebagai fasilitator ketertiban yang inklusif. Hubungan timbal balik ini menciptakan iklim pengawasan yang partisipatif di Kota Jambi. Dampaknya, masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dalam penataan kota, sementara kelompok gelandangan dan pengemis memunculkan kepatuhan sukarela karena merasa diperlakukan secara adil dan manusiawi.

3.3. Interpretasi dan Pemaknaan Sosial oleh Masyarakat

Kehadiran petugas dan armada Satpol PP di jalanan protokol Kota Jambi secara berkala menstimulasi berbagai tafsiran dari warga yang menyaksikannya. Penafsiran atau pemaknaan sosial masyarakat terhadap atribut dan aktivitas patroli tersebut dipetakan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Interpretasi Publik terhadap Atribut Otoritas dan Kehadiran Rutin Patroli Satpol PP

Objek Stimulus	Penafsiran / Pemaknaan oleh Masyarakat	Dampak terhadap Persepsi Publik
1. Atribut dan Aktivitas Patroli *(Seragam dinas, mobil patroli, kehadiran petugas)*	Diartikan secara positif sebagai simbol kontrol sosial yang sah, penegakan supremasi aturan (Perda), dan manifestasi ketegasan pemerintah daerah.	Kehadiran atribut tersebut memberikan efek psikologis berupa rasa aman, tertib, dan nyaman bagi warga yang sedang beraktivitas di jalan atau fasilitas umum.
2. Kehadiran Rutin Petugas di Lapangan	Dimaknai sebagai bentuk pelayanan perlindungan masyarakat yang nyata, bukan sekadar formalitas kerja birokrasi.	Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja Satpol PP Kota Jambi dalam menjaga estetika dan ketenteraman kota.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Adanya stimulus visual berupa atribut patroli di ruang publik telah membentuk sentimen positif yang kuat di kalangan masyarakat Kota Jambi. Atribut fisik seperti seragam resmi, baret, dan mobil patroli tidak lagi ditakuti sebagai lambang kekerasan atau arogansi aparat, melainkan diinterpretasikan sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan warga. Pemaknaan sosial yang positif ini menjadi modal legitimasi yang sangat penting bagi Satpol PP. Kehadiran rutin petugas di kawasan rawan mengonstruksi persepsi publik bahwa pemerintah daerah serius dalam mengelola ketenteraman kota dan melindungi kenyamanan aktivitas warga sehari-hari.

3.4 Pembentukan Makna Kolektif

Proses interaksi dan edukasi yang dilakukan secara intensif oleh petugas lambat laun mengkristal menjadi sebuah kesepahaman bersama di ruang publik mengenai esensi ketertiban kota. Proses pembentukan makna kolektif dan dukungan sosial yang lahir dari masyarakat dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Konstruksi Makna Kolektif Ketertiban Ruang Jalan dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif

Aspek Kesepahaman	Proses Internalisasi Makna Kolektif	Hasil / Dukungan Sosial Masyarakat
1. Definisi Bersama tentang Ketertiban	Melalui edukasi patroli, petugas membangun pemahaman bahwa ruang publik yang tertib adalah hak dan tanggung jawab bersama warga, bukan hanya tugas aparat.	Terbangun kesadaran kolektif (meski belum 100% seragam) di kalangan pengguna jalan untuk mulai menolak memberikan uang kepada gepeng di persimpangan demi memutus rantai masalah sosial.
2. Kolaborasi Pengawasan	Mengajak tokoh masyarakat dan perangkat lokal untuk ikut	Terwujudnya dukungan sosial konkret berupa partisipasi aktif warga dalam memberikan informasi *real-time* mengenai pergeseran lokasi mangkal gepeng.

Aspek Kesepahaman	Proses Internalisasi Makna Kolektif	Hasil / Dukungan Sosial Masyarakat
	mengawasi keasrian lingkungannya masing-masing.	

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026

Pembentukan makna kolektif di tengah masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan perkembangan yang progresif, meskipun internalisasi nilai tersebut belum sepenuhnya seragam pada setiap lapisan warga. Mayoritas masyarakat mulai menyepakati definisi bersama bahwa jalan raya dan fasilitas umum harus bebas dari eksploitasi jalanan seperti mengemis. Manifestasi dari makna kolektif ini memicu munculnya dukungan sosial konkret, di mana para pengguna jalan mulai mengubah kebiasaan dengan menolak memberikan uang di persimpangan lampu merah. Kesadaran kolektif ini berkontribusi langsung dalam melemahkan ekosistem keberadaan gelandangan dan pengemis di wilayah perkotaan.

3.5 Perubahan Sikap dan Perilaku Sosial

Sebagai muara dari seluruh rangkaian interaksi simbolik yang terjadi di lapangan, dimensi ini mengukur efektivitas patroli terhadap perubahan nyata pada kondisi ketertiban lingkungan kota serta pola perilaku kelompok sasaran. Rincian hasil evaluasi perubahan sikap dan perilaku sosial tersebut dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 5

Perubahan Kondisi Ruang Publik Kota Jambi dan Pola Adaptasi Perilaku Gelandangan/Pengemis

Target Perubahan	Bentuk Perubahan Sikap & Perilaku	Karakteristik / Keterbatasan Hasil
1. Kondisi Ruang Publik *(Kec. Pasar Jambi, Kota Baru, Danau Sipin)*	Kawasan yang awalnya padat aktivitas gepeng berubah menjadi lebih bersih, tertib, kondusif, dan arus lalu lintas di persimpangan jalan menjadi lebih lancar.	**Kondisional (Jangka Pendek):** Ketertiban umum terjaga secara optimal selama intensitas pengawasan dan kehadiran ploting mobil patroli di lokasi tersebut tinggi.
2. Kelompok Gelandangan dan Pengemis	Menunjukkan sikap adaptif-situasional dengan mematuhi arahan saat ditertibkan, berpindah ke pinggiran kota, atau bersembunyi saat mobil patroli melintas.	**Adaptif-Sementara:** Perubahan perilaku belum permanen. Mereka cenderung kembali ke jalanan ketika pengawasan melonggar karena motif ekonomi dan belum tersedianya rumah singgah rehabilitasi sosial yang terpadu di Kota Jambi.

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2026

Kondisi ruang publik di titik-titik rawan seperti Kecamatan Pasar Jambi dan Kota Baru terbukti menjadi jauh lebih bersih, tertib, dan lancar pasca-intensifikasi patroli. Namun, analisis kritis terhadap dimensi ini memperlihatkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada diri gelandangan dan pengemis

masih bersifat adaptif-situasional (sementara). Mereka memodifikasi tindakannya—seperti bersembunyi atau berpindah lokasi ke pinggiran kota—bukan didasari oleh kesadaran hukum yang mendalam, melainkan strategi bertahan untuk menghindari penertiban petugas. Kepatuhan yang bersifat superfisial ini terjadi karena desakan motif ekonomi yang belum terselesaikan serta belum tersedianya fasilitas rehabilitasi sosial terpadu, sehingga keberlanjutan ketertiban kota masih sangat bergantung pada kehadiran fisik ploting mobil patroli di lapangan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mempertegas bahwa komunikasi yang sopan dan gestur yang tidak mengintimidasi dari aparat Satpol PP efektif dalam menurunkan resistensi kelompok rentan serta meraih dukungan sosial warga Kota Jambi.

Sama halnya dg temuan penelitian sebelumnya oleh Anthony et al. (2024) dalam kajiannya *Public Space Management and Urban Aesthetics* bahwa patroli ketertiban publik mampu meningkatkan rasa aman warga serta menekan aktivitas mengemis di ruang publik apabila dilaksanakan melalui pendekatan yang humanis. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa pola komunikasi yang sopan, edukatif, dan gestur tubuh yang tenang dari aparat Satpol PP Kota Jambi terbukti efektif mereduksi resistensi dari gelandangan dan pengemis serta berhasil membangun persepsi publik yang positif di tengah masyarakat Kota Jambi.

Berbeda dengan temuan penelitian Stevens et al. (2025) yang berjudul *Socioeconomic Determinants of Street Begging in Urban Areas* bahwa fenomena gelandangan dan pengemis dianalisis secara makro melalui determinan sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan urbanisasi , penelitian ini justru berfokus pada tataran mikro-sosiologis melalui pendekatan interaksi simbolik. Penulis secara spesifik membedah bagaimana pemaknaan atas tindakan simbolik petugas, proses komunikasi dua arah di lapangan, dan keterbukaan petugas dalam menerima aduan dari warga memengaruhi respons psikologis dan tindakan timbal balik secara langsung.

Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumya karena selaras dengan Beck (2025) dalam *Urban Homelessness and Public Order Policy in Global Cities* yang mengonfirmasi bahwa penegakan ketertiban di ruang publik hanya akan berhasil secara optimal dan substantif apabila disertai dengan dukungan kebijakan sosial yang holistik serta penyediaan tempat tinggal sementara atau fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi kelompok marginal. Hasil penelitian di Kota Jambi membuktikan bahwa pelaksanaan patroli di lapangan tanpa adanya jaminan sistem sosial lanjutan tersebut membuat hasil penertiban hanya bertahan dalam jangka pendek.

Temuan ini menolak penelitian sebelumnya oleh Prenzler et al. (2025) dalam *Community Policing and Homelessness Intervention* yang menyatakan bahwa patroli keamanan publik dapat secara ideal berfungsi sebagai *early intervention unit* yang langsung menghubungkan tunawisma dengan layanan sosial komunitas secara mapan. Penolakan ini terjadi karena perbedaan karakteristik objek penelitian dan keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, di mana Kota Jambi belum memiliki sistem rehabilitasi sosial permanen dan sarana rumah singgah terpadu khusus bagi gelandangan dan pengemis. Karakteristik objek ini menyebabkan Satpol PP Kota Jambi terpaksa bergerak sebagai instrumen tunggal di lapangan, sehingga perubahan perilaku gelandangan dan pengemis baru sebatas modifikasi perilaku adaptif-situasional (sementara) untuk menghindari jangkauan petugas patroli.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat utama dari tercapainya ketertiban umum yang absolut di Kota Jambi, yakni belum tersedianya sistem rehabilitasi sosial permanen atau fasilitas rumah singgah terpadu bagi gelandangan dan pengemis. Keterbatasan infrastruktur sosial ini memaksa Satpol PP bekerja sebagai instrumen tunggal di lapangan. Akibatnya, meskipun proses interaksi simbolik telah berjalan sangat humanis dan masyarakat merespons positif, efektivitas penertiban menjadi terbatas pada pengendalian sesaat, di mana gelandangan dan pengemis akan kembali beraktivitas ke jalan raya ketika merasa situasi pengawasan sudah melonggar atau aman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, pelaksanaan patroli ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi dalam penanganan gelandangan dan pengemis telah berhasil menggambarkan dan menjawab tujuan penelitian melalui lima dimensi interaksi simbolik yang saling berkaitan. Pertama, petugas telah mengimplementasikan tindakan simbolik yang humanis melalui komunikasi persuasif, bahasa yang sopan, dan gestur non-represif sesuai SOP, sehingga efektif mereduksi resistensi dari kelompok sasaran di lapangan. Kedua, dalam proses interaksi sosial, terbangun hubungan timbal balik yang situasional namun kooperatif antara petugas dan kelompok sasaran, yang didukung oleh sikap responsif aparat dalam mengakomodasi keluhan serta laporan dari masyarakat.

Ketiga, dari aspek interpretasi dan pemaknaan sosial, kehadiran fisik petugas beserta atribut resmi patroli di ruang publik ditafsirkan secara positif oleh masyarakat Kota Jambi sebagai simbol kehadiran negara yang memberikan rasa aman, tertib, dan nyaman. Keempat, rangkaian interaksi dan edukasi tersebut berhasil membentuk makna kolektif berupa kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga estetika kota, yang diwujudkan melalui dukungan konkret pengguna jalan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di persimpangan jalan. Terakhir, meskipun intensifikasi patroli rutin terbukti berhasil mewujudkan perubahan kondisi ruang publik menjadi lebih bersih dan tertib, perubahan sikap dan perilaku sosial kelompok gelandangan dan pengemis didapati masih bersifat adaptif-situasional atau sementara demi menghindari petugas, dikarenakan belum tersedianya fasilitas rumah singgah rehabilitasi sosial yang permanen sebagai solusi jangka panjang di Kota Jambi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada tingginya mobilitas kelompok gelandangan dan pengemis yang berpindah-pindah serta kecenderungan mereka untuk bersikap tertutup, sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan penggalian data (wawancara) secara lebih mendalam dan terbuka dengan kelompok sasaran tersebut. Selain itu, kegiatan evaluasi patroli rutin oleh pihak Satpol PP Kota Jambi belum terdokumentasi secara khusus dalam bentuk laporan tertulis, sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam menganalisis data sekunder terkait hasil evaluasi program secara komprehensif. Penelitian ini juga dibatasi oleh alokasi waktu dan hanya berfokus pada tiga kecamatan di Kota Jambi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan keterbatasan yang ada, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan lokus penelitian serta secara khusus melibatkan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Sosial, guna mengkaji efektivitas penyediaan fasilitas rumah

singgah dan program rehabilitasi sosial lanjutan. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji fenomena ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik tingkat korelasi antara intensitas patroli ketertiban dengan penurunan jumlah gelandangan dan pengemis di ruang publik secara jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kasatpol PP Kota Jambi beserta jajarannya, masyarakat Kota Jambi yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Serta rekan-rekan dan juga dosen pembimbing yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anthony, T., Walsh, T., McNamara, L., & Quilter, J. (2024). Hyper-policing the homeless: Lived experience and the perils of benevolent and malevolent policing. *Critical Criminology*, 32(3), 609–627. https://doi.org/10.1007/s10612-024-09775-3

Beck, B. (2025). Local government spending: Policing versus social services. *Annual Review of Criminology*, 8(1), 505–528. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-111523-122639

Bezgrebelna, M., McKenzie, K., Wells, S., Ravindran, A., Kral, M., Christensen, J., Stergiopoulos, V., Gaetz, S., & Kidd, S. A. (2021). Climate change, weather, housing precarity, and homelessness: A systematic review of reviews. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph18115812

Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.

Khairi, H., Ardieansyah, A., Pambayun, K. G., & Barus, A. I. (2025). Evaluation of the quality of use of the Makaverse News Application regarding the digital divide in Makassar City, Indonesia. *International Journal of Kybernology*, 6(2). https://doi.org/10.33701/ijok.v6i2.5843

Lundberg, K., Popovski, H., & Young, A. (2024). Spatial governance of the unhoused: On social death in the contemporary city. *Social and Legal Studies*. https://doi.org/10.1177/09646639241265358

Madjid, U. (2023). *Metodologi penelitian tata pamong dan perlindungan masyarakat*. PT Refika Aditama.

Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society: From the standpoint of a social behaviorist*. University of Chicago Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Prenzler, T., Cairns, N., Moir, E., Rayment-McHugh, S., & Wilson, E. (2025). Integrating safety, order and duty of care in public space foot patrols. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*. https://doi.org/10.1080/18335330.2025.2547609

Stevens, L., Milaney, K., & Penich, T. (2025). Homelessness, social disorder and public transit in Calgary, Canada: Examining perspectives from law enforcement through the lens of critical social theory. *International Journal on Homelessness*, 5(2), 1–22. https://doi.org/10.5206/ijoh.2023.3.21346

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Uluputty, I. (2018). Penataan manajemen sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 6(2). https://doi.org/10.33701/jmsda.v6i2.493